

***The Effects of Community Participation and Policy Transparency on the Relationship Between Knowledge of Village Consultative Bodies (Bpd) towards Budget and Village Financial Supervision***

**Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Desa**

Rusmianto<sup>1)</sup>, Maryani<sup>2)</sup>, Arif Makhsun<sup>3)</sup>

- <sup>1)</sup> Staf Pengajar pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung  
<sup>2,3)</sup> Staf Pengajar pada Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung  
E-mail: rusmianto@polinela.ac.id

**Abstract**

*The objective of this study is to know: (1) the influence of BPD Knowledge on budgets on village financial oversight (APBDesa); (2) the influence of interaction of Community participation on the relationship between knowledge of BPD on budget and village financial oversight (APBDesa); (3) The Influence of Public Policy Transparency Interaction on the relationship between knowledge of BPD on budgets and village financial oversight (APBDesa) and (4) Influence of BPD Knowledge interaction on budget, community participation, and transparency of public policy towards village financial oversight (APBDesa). This research was conducted by using the members of the Village Consultative Board (BPD) villages in Waysulan Sub-district, South Lampung Regency (8 Villages) as its object. The hypothesis in this research was tested by using multiple analysis (multiple regression). The data processing is done with the help of SPSS statistical application. Hypothesis testing performed after multiple regression models are used free of violation of classical assumptions, so that the test results can be interpreted appropriately. The conclusions can be drawn is that the knowledge of village consultative bodies (BPD) has a significant positive effect on the level of village financial oversight, while public participation, accountability, and transparency of public policy do not affect the relationship between the knowledge of members of village consultative bodies (BPD) these three variables (public participation, accountability, and transparency of public policy) directly affect the level of oversight of village financial management.*

**Key words:** *Village Consultative Board (BPD), Participation, Knowledge of BPD, Village financial supervision, Transparency.*

**Pendahuluan**

Salah satu bidang fokus penelitian yang tercantum dalam rencana strategis penelitian Politeknik Negeri Lampung Tahun

2016-2020 adalah pengembangan kawasan industri kreatif berbasis kearifan lokal dan pangan olahan. Dalam rangka pengembangan kawasan industri tersebut,

desa menjadi subjek sekaligus objek yang penting sebagai tempat ataupun pelaksana dari pengembangan ini. Oleh karena itu, desa terutama pengelolaan desa harus baik, efisien dan efektif sehingga sumber daya desa dapat dialokasikan dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015). Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU Desa dan peraturan pelaksanaannya bersifat representatif. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berasal dari wakil-wakil kelompok di masyarakat, termasuk wakil perempuan.

Dalam tataran penciptaan pengelolaan keuangan yang baik, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi semakin penting dalam mengawasi setiap kebijakan pemerintah desa. Tujuan dari pengawasa ini adalah agar setiap sumber daya yang dikelola oleh pemerintah desa (uang) dapat dikelola seoptimal mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Menurut pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2015 BPD mempunyai fungsi untuk: (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sementara pada pasal 61 disebutkan hak BPD antara

lain: (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; (2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Pramono (2002) dalam Werimon (2005), pengawasan anggaran yang dilakukan oleh legislatif dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh Legislatif yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar yang akan memperkuat fungsi pengawasan oleh Legislatif yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh legislatif, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Achmadi (2012) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan

partisipasi warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Coryanata, 2012). Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru dalam sistem pemerintahan desa. Tantangan utama lembaga ini adalah kapasitas sumber daya yang masih lemah terutama dilatar belakangi tingkat pendidikan rendah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji: 1) Pengaruh Pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan desa (APBDesa); 2) Pengaruh interaksi Partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran

dengan pengawasan keuangan desa (APBDesa); 3) Pengaruh Interaksi Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa (APBDesa); dan 4) Pengaruh interaksi Pengetahuan BPD tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan desa (APBDesa).

### **Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian**

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota BPD, kapasitas, dan profesi BPD sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan BPD yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan desa selain kepiawaian BPD dalam berpolitik mewakili konstituen. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan desa salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota BPD dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pengetahuan BPD tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa.**

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya

partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Peranan BPD dalam melakukan pengawasan keuangan desa akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh BPD, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa.**

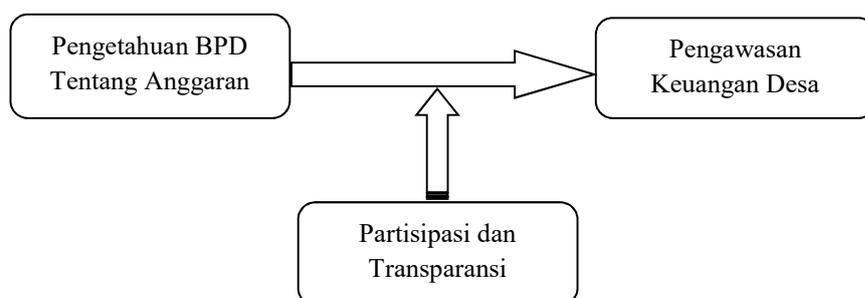
**H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa.**

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran

juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBDesa maka pengawasan yang dilakukan oleh BPD akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga hipotesis penelitiannya adalah:

**H4: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa.**

Berdasarkan hipotesis variabel-variabel penelitian seperti yang diajukan di atas, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa-desa di Kecamatan Waysulan (8 Desa) sebagai objeknya. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive jugmnet* dengan pertimbangan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang profil keuangan dari suatu desa. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan dimulai dari bulan Juli 2017 s.d. November 2017.

Sumber data dalam penelitian ini akan diambil dari data primer dan sekunder di lapangan. Data primer dikumpulkan dengan melakukan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang digunakan dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Corynata (2012). Data primer dikumpulkan dari para *key informan* yang terdiri dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh desa yang ada di Kecamatan Waysulan yang berjumlah 56 anggota BPD (8 desa X 7 anggota BPD setiap desa). Data sekunder dari kantor desa, seperti monografi desa, hasil sensus pertanian, hasil sensus ekonomi, peraturan-peraturan desa yang relevan dengan topik studi dikumpulkan sebagai bahan untuk analisis data.

## Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: pengetahuan dewan

tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik. Dan sebagai variabel dependen adalah pengawasan keuangan daerah (APBD).

### 1. Pengetahuan BPD tentang Anggaran

Pengetahuan BPD tentang anggaran adalah kemampuan BPD dalam hal menyusun anggaran (RAPBDesa/APBDesa), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Untuk mengukur variabel pengetahuan dikembangkan instrumen yang digunakan oleh Werimon (2012). Pengetahuan tentang anggaran diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) pertanyaan dengan pengukur skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

### 2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh BPD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas dan serta advokasi anggaran dan masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan. Untuk mengukur variabel Partisipasi masyarakat, dikembangkan instrumen yang digunakan oleh Werimon (2012). Partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan 14 (empat belas) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala likert

yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju ), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

### 3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Untuk mengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Werimon (2012). Transparansi Kebijakan Publik diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju ), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

### 4. Pengawasan Keuangan Desa

Pengawasan Keuangan Desa adalah pengawasan terhadap keuangan desa yang dilakukan oleh BPD yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBDesa). Untuk mengukur variabel Pengawasan Keuangan Desa digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Werimon (2012). Pengawasan Keuangan Desa

diukur dengan menggunakan 24 (dua puluh empat) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju ), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

### Pengujian Hipotesis

Alat analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis berganda (*multiple regression*). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi statistik SSPSS. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

#### 1) Untuk menguji hipotesis 1 (H1)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y = Pengawasan Keuangan Desa (APBDesa)

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Pengetahuan BPD tentang anggaran

#### 2) Untuk menguji hipotesis 3 (H3)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e \dots \dots (2)$$

Dimana:

Y = Pengawasan Keuangan Desa (APBDesa)

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Pengetahuan BPD tentang anggaran

X2 = Partisipasi masyarakat

X2 = Interaksi antara X1 dan X2

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi

### 3) Untuk menguji hipotesis 2 (H2)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_1 X_3 + e \dots (3)$$

Dimana:

Y = Pengawasan Keuangan Desa (APBDesa)

X3 = Akuntabilitas

X1, X3 = interaksi antara X1 dan X3

$\beta_4 \beta_5$  = Koefisien Regresi

### 4) Untuk menguji hipotesis 4 (H4)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_6 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + e \dots (4)$$

Dimana:

Y = Pengawasan Keuangan Desa (APBDesa)

X4 = Transparansi kebijakan publik

X4 = Interaksi antara X1 dan X4

$\beta_6 \beta_7$  = Koefisien Regresi

## Hasil dan Pembahasan

### Profil Responden

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) di desa-desa di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan (8 Desa) sebagai objeknya yang berjumlah 56 orang anggota BPD. Dari 56 kuesioner yang disebarakan terdapat 35 kuesioner yang layak dianalisis karena 15 kuesioner diisi tidak lengkap. Profil responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Profil Responden

No	Profil	Kriteria	%
1	Gender	Laki-Laki	71
		Perempuan	29
2	Umur	Minimal	29
		Maksimal	53
		Rata-Rata	40
3	Jenjang Pendidikan	SMA/SMK	81
		D1-D3	0
		S1	19
4	Jabatan	Ketua BPD	10
		Wakil Ketua BPD	14
		Anggota BPD	76
5	Lama Menjabat	Minimal	4
		Maksimal	11
		Rata-Rata	6

Tabel 3 menyajikan profil responden para anggota BPD di Kecamatan Waysulan. Para anggota BPD mayoritas berjenis kelamin laki-laki (71%), rata-rata dalam masa produktif yaitu 40 tahun, jenjang

pendidikan sebagian besar tamatan SMA (81%), dan rata-rata telah menjabat BPD lebih dari 6 tahun. Hal yang dapat dipetik adalah bahwa dengan pengalaman menjadi anggota BPD lebih dari 6 tahun seharusnya

BPD telah memahami tugas dan fungsi pokok BPD dengan baik.

### Pengujian Hipotesis I

Pengujian hipotesis I dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap pengawasan

keuangan desa yang dinyatakan bahwa **Pengetahuan BPD tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa.** Hasil analisis regresi untuk hipotesis pertama disajikan dalam Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Hasil Regresi Hipotesis 1

Ket	n	r <sup>2</sup>	F	Sig	B	t	Sig
Uji Anova	35	0,79	130,5	0.000			
Konstanta					41,5	45.975	.000
Pengetahuan Dewan					10,5	11.422	.000

Tabel 4 menggambarkan hasil analisis regresi pengaruh pengetahuan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap pengawasan keuangan desa. Pada taraf signifikansi 0,05, pengetahuan badan permusyawaratan desa (BPD) berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.000 dengan nilai konstantanya 10,5. Hal yang dapat dipetik dari temuan ini adalah bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota BPD terhadap anggaran maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa. dengan melihat latar belakang BPD yang rata-rata lulusan sekolah menengah atas, maka pelatihan dan pendidikan tentang

anggaran masih sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan para anggota BPD hal ini mengingat rata-rata pengetahuan dewan tentang anggaran bernilai 3,27 atau bernilai cukup.

### Pengujian Hipotesis II

Pengujian hipotesis II dilakukan untuk menguji pengaruh interaksi variabel akuntabilitas dan pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan desa yang dinyatakan bahwa **Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa.** Hasil analisis regresi untuk hipotesis kedua disajikan dalam Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Hasil Regresi Hipotesis 2

Ket	n	r <sup>2</sup>	F	Sig	B	t	Sig
Uji Anova	35	0,84	54,47	0.000			
Konstanta					41.131	27.128	0.000
Pengetahuan Dewan					6.511	3.909	0.000
Akuntabilitas					4.772	2.869	0.007
Interaksi antara akuntabilitas dan pengetahuan dewan					0.922	0.302	0.765

Tabel 5 menggambarkan hasil analisis regresi pengaruh interaksi variabel akuntabilitas dan pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan desa. Nilai adjusted r square = 0.825, sehingga 82.5% model pengawasan keuangan desa mampu dijelaskan oleh variabel pengetahuan anggota BPD tentang anggaran, akuntabilitas, dan variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan akuntabilitas, sedangkan 17.5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Uji anova atau uji statistik f menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0.00. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.10, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengawasan keuangan desa, atau dapat dikatakan bahwa pengetahuan anggota BPD tentang anggaran, akuntabilitas, dan variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa.

Hasil uji statistik t menghasilkan bahwa

- a. Variabel pengetahuan anggota BPD tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi = 0.00 kurang dari 0.10.
- b. Variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi = 0.007 kurang dari 0.10

- c. Variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi = 0.765 lebih besar dari 0.10. Karena variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa maka akuntabilitas tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dan pengawasan keuangan desa.

Hal yang dapat dipetik dari hasil uji statistik ini adalah akuntabilitas, yaitu akuntabilitas yang secara teori dianggap mempengaruhi hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa, ternyata hal tersebut tidak terjadi. Akan tetapi, akuntabilitas justru merupakan sebuah variabel independen/prediktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam model pengawasan keuangan desa yang terbentuk.

### **Pengujian Hipotesis III**

Pengujian hipotesis III dilakukan untuk menguji pengaruh interaksi variabel partisipasi dan pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan desa yang dinyatakan bahwa **partisipasi berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa.** Hasil analisis regresi untuk

hipotesis ketiga disajikan dalam Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Hasil Regresi Hipotesis 3

Ket	n	r <sup>2</sup>	F	Sig	B	t	Sig
Uji Anova	35	0,82	49,8	0.000			
Konstanta					42.322	34.158	.000
Pengetahuan Dewan					9.393	9.524	.000
Partisipasi					1.818	1.813	.079
Interaksi antara partisipasi dan pengetahuan dewan					-1.118	-.905	.372

Tabel 6 menggambarkan hasil analisis regresi pengaruh interaksi variabel partisipasi dan pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan desa. Nilai adjusted r square = 0.82, sehingga 82% model pengawasan keuangan desa mampu dijelaskan oleh variabel pengetahuan anggota BPD tentang anggaran, partisipasi, dan variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan partisipasi, sedangkan 18% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Uji anova atau uji statistik f menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0.00. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.10, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengawasan keuangan desa, atau dapat dikatakan bahwa pengetahuan anggota BPD tentang anggaran, partisipasi, dan variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan partisipasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa.

Hasil uji statistik t menghasilkan bahwa

- a. Variabel pengetahuan anggota BPD tentang anggaran berpengaruh signifikan

terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi =0.00 kurang dari 0.10.

- b. Variabel partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi=0.007 kurang dari 0.10
- c. Variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi=0.372 lebih besar dari 0.10. Karena variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa maka partisipasi tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dan pengawasan keuangan desa.

Hal yang dapat dipetik dari hasil uji statistik ini adalah partisipasi, yaitu partisipasi yang secara teori dianggap mempengaruhi hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa, ternyata hal tersebut tidak terjadi. Akan tetapi, partisipasi justru

merupakan sebuah variabel independen/prediktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam model pengawasan keuangan desa yang terbentuk.

#### Pengujian Hipotesis IV

Pengujian hipotesis IV dilakukan untuk menguji pengaruh interaksi variabel transparansi kebijakan publik dan pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap

pengawasan keuangan desa yang dinyatakan bahwa **transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa.** Hasil analisis regresi untuk hipotesis ketiga disajikan dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Regresi Hipotesis 4

Ket	n	r <sup>2</sup>	F	Sig	B	t	Sig
Uji Anova	35	0,82	48,18	0.000			
Konstanta					42.831	21.082	.000
Pengetahuan Dewan					9.305	6.954	.000
Transparansi kebijakan publik					2.169	1.769	.087
Interaksi antara transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan					-1.873	-.718	.478

Tabel 7 menggambarkan hasil analisis regresi pengaruh interaksi variabel transparansi kebijakan publik dan pengetahuan BPD tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan desa. Nilai adjusted r square = 0.82, sehingga 82% model pengawasan keuangan desa mampu dijelaskan oleh variabel pengetahuan anggota BPD tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, dan variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik, sedangkan 18% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Uji anova atau uji statistik f menghasilkan tingkat signifikan sebesar 0.00. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.10, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengawasan keuangan

desa, atau dapat dikatakan bahwa pengetahuan anggota BPD tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, dan variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa.

Hasil uji statistik t menghasilkan bahwa

- Variabel pengetahuan anggota BPD tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi = 0.00 kurang dari 0.10.
- Variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi = 0.087 kurang dari 0.10

c. Variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa, karena nilai signifikansi=0.478 lebih besar dari 0.10. Karena variabel interaksi pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan desa maka transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggota BPD tentang anggaran dan pengawasan keuangan desa.

Hal yang dapat dipetik dari hasil uji statistik ini adalah transparansi kebijakan publik, yaitu transparansi kebijakan publik yang secara teori dianggap mempengaruhi hubungan antara pengetahuan BPD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan desa, ternyata hal tersebut tidak terjadi. Akan tetapi, transparansi kebijakan publik justru merupakan sebuah variabel independen/ prediktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam model pengawasan keuangan desa yang terbentuk.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengawasan keuangan desa, sedangkan

partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dengan tingkat pengawasan keuangan desa tetapi ketiga variabel tersebut (partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik) berpengaruh langsung terhadap tingkat pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya penelitian dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat dilakukan sehingga akan memperoleh gambaran yang lebih komperhensif terhadap pengetahuan anggota badan permusyawaratan desa (BPD), pengawasan keuangan desa, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik.

### **Daftar Pustaka**

- Achmadi, dkk, 2012, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Coryanata, Isma. 2012. Akuntabilitas, partisipasi dan Transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12 No. 2
- Ghozali. Imam, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa*.

- www.kpk.go.id. (diakses tanggal 12 Mei 2017)
- Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. MEP UGM, Jogjakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Keputusan Presiden No.74 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sjamsudin, S. 2012. Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah diKabupaten,
- Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial*, Malang.
- Sopannah, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Prosiding SNA VI Surabaya
- Werimon, Simson. 2005. Pengaruh partisipasi dan kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Tesis PPS Undip ([www.e-printundip.ac.id](http://www.e-printundip.ac.id)). (diakses 10 Juli 2017)
- Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela>. (diakses 12 Juli 2017)